BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem ekonomi di Indonesia menganut sistem ekonomi pancasila, yang mana mengandung prinsip keadilan dan prinsip demokrasi ekonomi. Prinsip keadilan yaitu prinsip pembagian pendapatan yang seimbang, sementara prinsip demkrasi ekonomi adalah prinsip perekonomian yang diselenggarakan dengan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi.[2]

Kondisi perekonomian di Indonesia saat ini masih menjadi permasalahan yang mengakibatkan perlunya perhatian khusus dari pemerintah untuk menciptakan pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Indonesia sendiri termasuk negara berkembang, sehingga banyak tantangan dalam proses untuk meningkatkan pembangunan. Pembangunan ekonomi diperlukan dalam proses untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengetahui keberhasilan pembangunan ekonomi dapat dilihat melalui salah satu indikatornya yaitu pertumbuhan ekonomi. Menurut Sadono Sukirno mengatakan pertumbuhan ekonomi merupakan proses meningkatnya barang dan jasa yang diproduksi secara terus menerus dalam jangka waktu yang panjang[3]. Dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang positif dapat menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat dikarenakan tingginya

[2] Tulus T. H. Tambunan, *Perekonomian Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2018), 10.
[3] Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan Pembangunan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 33.

produktivitas masyarakat. Namun, sebaliknya apabila pertumbuhan ekonomi yang mengalami penurunan akan mengakibatkan perekonomian dikatakan buruk. Pertumbuhan ekonomi tingkat daerah dapat dilihat dari PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) daerah tersebut.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat bergantung terhadap pembangunan daerah. Pembangunan daerah dapat dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah dengan akar dan sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan melalui pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. Pembangunan ekonomi daerah adalah kerja sama yang dibangun antara pemerintah dan sektor swasta untuk memanfaatkan sumber daya yang ada sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Pembangunan ekonomi daerah tidak lepas dari Undang-Udang No. 22 tahun1999 dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999, pemerintah pusat melimpahkan wewenang kepada daerah untuk mengatur daerahnya atau sering disebut otonomi daerah.[4]

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan melalui upaya pembangunan ekonomi tingkat daerah mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Selain itu, pembangunan ekonomi tingkat daerah dilakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang mungkin muncul dalam ketimpangan alokasi sumber daya. Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya pemerintah yang ikut andil untuk mengatasinya

[4]Komang Wididarma & Made Jember, "Perngaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali", *E-Jurnal EP Unud* 10, no. 7 (28 Juli 2021): 2982-3010.

melainkan semua anggota masyarakat. Sehingga, pemerintah wajib untuk dapat memberdayakan dan mendorong seluruh masyarakat, khususnya sektor swasta untuk turut mengambil peran dalam usaha meningkatkan kesejahteraan sosial.[5] Dengan demikian diperlukannya faktor pendorong pertumbuhan ekonomi untuk mengetahui sukses atau tidaknya perekonomian. Menurut Todaro terdapat tiga faktor dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, dan kemajuan teknologi. Upaya pembangunan ekonomi suatu negara dapat dilakukan pada tingkat daerah mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.

Pertumbuhan ekonomi bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang mana berkaitan dengan kepemilikan barang, sehingga masyarakat miskin dapat diartikan mereka yang tidak memiliki pendapatan atau konsumsi yang memadai untuk membuat mereka berada dalam kategori sejahtera. Di Indonesia sendiri kemisinan masih menjadi permasalahan yang kompleks dan harus segera diatasi. Kemiskinan terjadi disebabkan oleh beberapa faktor yang diantaranya yaitu kualitas sumber daya manusia rendah, sumber daya alam tidak dikelola dengan baik, rendahnya tingkat pendidikan, pertumbuhan ekonomi dan pengangguran.[6]

[5]Firsta A. F. Asmoro, dkk., "Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tenaga Kerja, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2021", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no. 3 (Oktober 2022): 1788-1794.

[6] Erna Dian Ristika, Wiwin Priana Primandhana, Mohammad Wahed, "Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur", *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* 12 no. 2 (November 2021): 129-136.

Gambar 1. 1
Distribusi dan Pertumbuhan Ekonomi PDRB Provinsi 2023

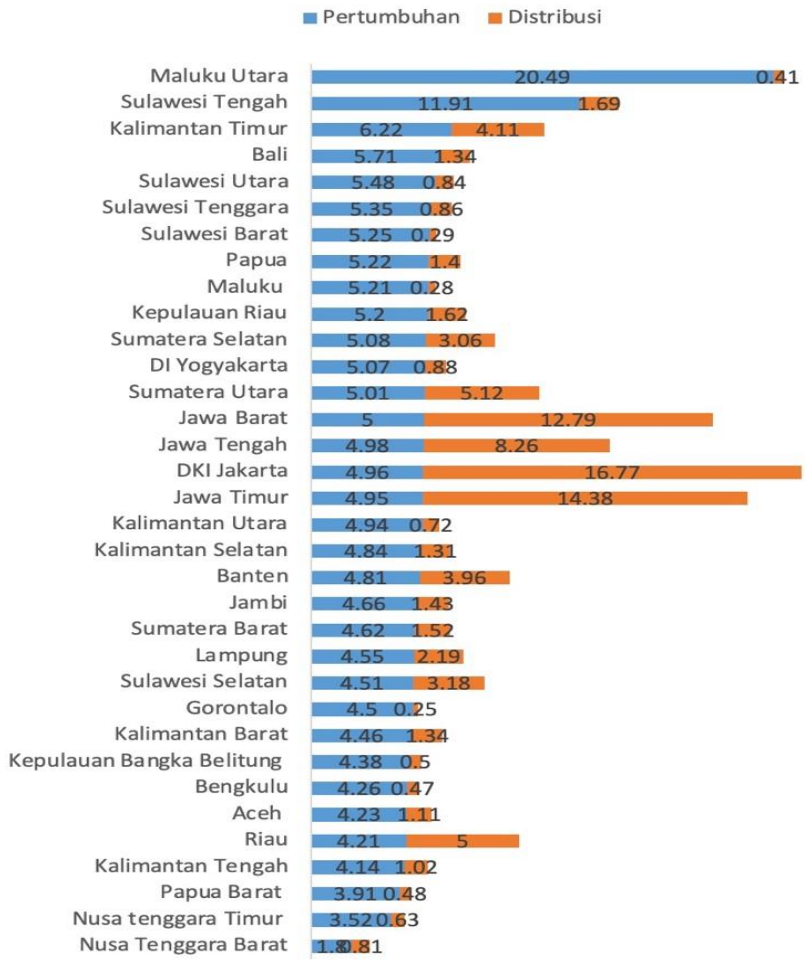

Sumber: BPS Indonesia, 2019-2023

Berdasarkan data di atas, pertumbuhan dan distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) nasional pada tahun 2023. Distribusi PDRB menunjukkan kontribusi masing-masing provinsi terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) nasional pada tahun 2023. Provinsi yang memiliki kontribusi terbesar terhadap perekonomian Indonesia adalah DKI Jakarta yaitu 16,77%, Jawa Timur 14,38% dan Jawa Barat 12,79% dengan total kontribusi sebesar 43,94%. Sementara dilihat dari pertumbuhan PDRB tertinggi

terjadi di Provinsi Maluku Utara dan Sulawesi Tengah, sebesar 20,49% dan 11,91%. Hal ini didorong oleh kinerja ekspor nikel serta besi dan baja ke luar negeri. Di sisi lain, pertumbuhan terendah terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 1,80%.

Meskipun Jawa Timur merupakan provinsi dengan kontribusi ekonomi terbesar kedua secara nasional, pertumbuhan ekonominya justru tidak setinggi provinsi-provinsi lain seperti Maluku Utara (20,49%) atau Sulawesi Tengah (11,91%). Hal ini menandakan bahwa meskipun Jawa Timur memiliki struktur ekonomi yang kuat, dinamika pertumbuhan ekonominya masih menghadapi sejumlah tantangan, salah satunya berkaitan dengan ketimpangan antar kabupaten/kota, tingkat kemiskinan, kualitas sumber daya manusia, dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.

Dengan luas wilayah yang besar, jumlah penduduk yang tinggi, dan kompleksitas struktur ekonomi antar daerah, Jawa Timur menjadi wilayah yang sangat representatif untuk meneliti pengaruh variabel-variabel pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini diperkuat oleh temuan dari Komang Wididarma dan Made Jember dalam penelitiannya di Provinsi Bali yang menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan.[7] Oleh karena itu, meneliti hubungan antara kemiskinan, IPM, dan PAD terhadap pertumbuhan ekonomi di tingkat kabupaten/kota di Jawa

[7] Komang Wididarma dan Made Jember, "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali," *E-Jurnal EP Unud* 10, no. 7 (2021), hal. 2982–3010.

Timur menjadi sangat relevan dan strategis, terutama sebagai dasar rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan.

Sedangkan mengentaskan kemiskinan menjadi salah satu faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi, sebab pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran pembangunan dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan perekonomian. Kemiskinan menurut prespektif ekonomi islam dipandang sebagai sesuatu yang mengakibatkan bahaya jiwa dan iman seseorang. Al-Quran juga menganjurkan agar bekerja sebagai salah satu cara mengentaskan kemiskinan. Di mana Tuhan menciptakan bumi dan langit diberikan kepada manusia untuk dikelola dengan baik agar tidak terus hidup dalam kesengsaraan dan kebingungan.[8]

Kemiskinan dalam pandangan islam menjadi masalah yang harus diselesaikan agar tidak memberikan dampak yang buruk dengan berbagai kejahatan yang merugikan diri sendiri ataupun orang lain, dan terhindar dari kekafiran. Sesuai di dalam firman Allah dalam QS. An-Nisa' ayat 9, islam melarang umatnya untuk meninggalkan bahkan mengabaikan keluarganya yang berada dalam keadaan lemah dan miskin.

وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰفًا خَافُوْا عَلَيْهِمْۖ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ﴿٩﴾

Artinya: Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan

[8] Nurul Aeni, "Respon Agama Terhadap Kemiskinan Prespektif Sosiologi", *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia*, 2, no. 1 (2021): 47-59.

berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).[9]

Berikut ini merupakan persentase kemiskinan tahun 2018-2019 di Provinsi Jawa Timur.

Tabel 1. 1
Tingkat Kemiskinan di Jawa Timur Tahun 2019-2023

No	Tahun	Penduduk Miskin (Ribu/Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
1	2019	4.112,25	10,37
2	2020	4.419,10	11,09
3	2021	4.572,73	11,40
4	2022	4.181,29	10,38
5	2023	4,188,81	10,35

Sumber: BPS Jawa Timur 2023 data diolah

Berdasarkan tabel diatas persentase kemiskinan di Jawa timur mengalami fluktuasi atau naik turun sejak tahun 2019 sampai 2023 mengalami penurunan dari 10,37% menjadi 10,35% yang berarti turun sebanyak 0,02% dalm kurun waktu 5 tahun. Di tahun 2020 sampai 2021 peningkatan hingga 11,40% dan mengalami penurunan sebanyak 0%. Tentu jika diakumulasikan angka ini masih relatif tinggi untuk tingkat kemiskinan di Jawa Timur.

Teori *trickle down effect* menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang meningkat akan menghasilkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pembangunan ekonomi.[10] Hal ini juga akan mengurangi angka kemiskinan jika pertumbuhan ekonomi suatu wilayah terus meningkat begitupun sebaliknya, kemiskinan akan meningkat jika suatu wilayah pertumbuhan ekonominya tidak

[9] Al – Qur'an Dan Terjemahannya, *edisi Kementrian Agama* …., QS. An-Nisa': 9.

[10]Ari Kristin Prasetyoningrum, & U. Sulia Sukmawati, "Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia", *Equilibirium Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2018): 217-240.

stabil bahkan menurun. Laju pertumbuhan ekonomi menjadi tujuan utama pemerintah pusat bahkan di pemerintahan daerah dimana keduanya baik pemerintah dan masyarakat harus ikut andil dalam membangun perekonomian.[11]

Menurut Angga maulana dkk. untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat harus melakukan upaya untuk mengurangi angka kemiskinan. Karena kemiskinan sangat berpengaruh pada laju pertumbuhan ekonomi.[12] Maka dari itu upaya yang dilakukan oleh pemerintah khususnya Jawa Timur perlu dioptimalkan untuk menurunkan angka kemiskinan agar pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur lebih meningkat.

Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia memiliki keterkaitan dan saling berkontribusi satu dengan yang lain.[13] Pembangunan pertumbuhan ekonomi atau sebagai sarana menuju peningkatan pembangunan manusia. Pembangunan manusia dapat berkesinambungan apabila didukung oleh pertumbuhan ekonomi. Walaupun keduanya tidak memiliki hubungan secara otomatis, namun apabila kedua hal tersebut disatukan pada satu kebijakan pembangunan yang searah, maka akan tercipta suatu kekuatan yang dapat saling

---

[11] Erina Setiani Putri & Nur Ika Mauiyah, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Data Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur Periode 2018-2020)", *Jurnal Akuntansi Terapan dan Bisnis* 2, no. 2 (27 Desember 2022): 108-117.

[12] Angga Maulana, Muhammad Iqbal Fasa, & Suharto, "Pengaruh Tingkat Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Islam", *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika* 15, no. 1 (22 Februari 2022): 220-229.

[13] Anggraini, Rinda, Ayun, dan Luthfi Muta'ali, "Pola Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Dan Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2007- 2011", *Jurnal Bumi Indonesia* 2, no. 3 (2013): 233-242.

mendorong untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Sehingga pertumbuhan ekonomi akan sangat efektif untuk memperbaiki pembangunan manusia.

Todaro juga menyebutkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia merupakan gambaran untuk melihat perluasan, pemerataan, dan keadilan baik kesehatan, pendidikan, maupun kesejahteraan masyrakat. Dimana rendahnya Indeks Pembangunan Manusia juga akan mengurangi tingkat produktivitas masyarakat begitupun sebaliknya jika nilai IPM tinggi maka tingkat produktivitas akan meningkat. Alhudori juga mengatakan semakin tinggi nilai IPM hal tersebut menandakan bahwa kualitas hidup manusia juga semakin baik.[14]

Berikut tabel Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2023.

Tabel 1. 2
Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2019-2023

No.	Tahun	Indeks Pembangunan Manusia (%)
1	2019	71,50
2	2020	71,71
3	2021	72,14
4	2022	72,75
5	2023	74,65

Sumber: BPS Jawa Timur 2023 data diolah

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa indeks pembangunan manusia cenderung meningkat dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Dimana kenaikan tersebut dari 71,50% menjadi 74,65%. Terdapat *Phenomena Gap*

[14] Jaehuda Jean Sany Mongan, "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Inonesia," *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, Kebijakan Publik* 4, no.2 (September 2019): 163-172.

antara Indeks Pembangunan Manusia dan Kemiskinan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ari Kristin Prasetyoningrum dan U. Sulia Sukmawati memperoleh hasil signifikan negatif jadi ketika nilai IPM meningkat maka angka kemiskinan akan menurun.[15] Sedangkan dalam data menunjukkan nilai Indeks Pembanunan Manusia dari tahun ke tahun meningkat tetapi pada tahun 2019-2021 angka kemiskinan justru meningkat.

Hal ini menjadi perhatian lagi dimana tingkat Indeks Pembangunan Manusia yang seharusnya berbanding lurus dengan tingkat kemiskinan yang nantinya juga akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah, ternyata jika dilihat dari data yang ada tidak demikian.

Indikator keberhasilan pembangunan ekonomi disuatu wilayah dapat dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sedangkan Pendapatan Asli Daerah adalah sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan daerah.[16] Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 disebutkan bahwa sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, diklasifikasikan dalam tiga sumber, yaitu: Pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain penerimaan yang sah. Khusus mengenai pendapatan asli daerah dapat dikatakan bahwa peranannya atau

[15] Ari Kristin Prasetyoningrum, dan U. Sulia Sukmawati, "Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Syariah*, 6, no. 2 (2018): 231.

[16] Amin Pujiati "Analisis Pertumbuhan Ekonomi di Karesidenan Semarang Era Desentralisasi Fiskal", *Jurnal Ekonomi Pembangunan Kajian Ekonomi Negara Berkembang*, 61-70.

sumbangannya terhadap keseluruhan APBD masih relatif kecil.

Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka semakin besar anggaran belanja terutama dalam pengalokasian belanja untuk kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu indikator kemiskinan, semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah maka semakin rendah tingkat kemiskinan masyarakat.

Tabel 1. 3
Tingkat PAD Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2019-2023

No	Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Triliun)
1	2019	19.327,13
2	2020	17.950,991
3	2021	18.935,886
4	2022	21.256,55
5	2023	22.317,21

Sumber: DJPK Kemenkeu data diolah

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat secara keseluruhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2019 sampai dengan 2023 mendapatkan rata-rata mengalami kenaikan selain tahun 2020 mengalami penurunan. Namun, hal ini berbanding dengan tingkat kemiskinan pada tahun 2020 yang juga mengalami kenaikan. Hal ini mungkin terjadi akibat dari peristiwa adanya Covid-19 yang sempat melanda Indonesia sehingga berpengaruh terhadap perekonomian.

Maka dari itu, berbanding lurus dengan Lingga Nopita Sari yang menyebutkan dalam penelitiannya bahwa Pendapatan Asli Daerah memilki pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi, yang artinya semakin

besar pendapatan asli daerah, akan meningkatkan persentase pertumbuhan perekonomian suatu negara apalagi lini provinsi seperti Jawa Timur.[17]

Secara keseluruhan, dari data-data diatas menggambarkan keberlanjutan pemulihan ekonomi di Jawa Timur. Proses ini didukung oleh upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber daya lokal, memperkuat konektivitas, dan mendorong investasi. Dengan tren pertumbuhan yang konsisten selama tiga tahun terakhir, Jawa Timur terus berkontribusi sebagai salah satu penggerak utama perekonomian nasional. Hal ini juga mencerminkan kemampuan provinsi ini untuk beradaptasi terhadap tantangan global dan menciptakan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan.

Maka dari itu, selain kemiskinan sebagai masalah struktural dapat menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi jika tidak diatasi secara efektif. Tingginya angka kemiskinan berpotensi melemahkan daya beli masyarakat, mengurangi produktivitas, serta memperlambat investasi. Di sisi lain, IPM sebagai ukuran kualitas hidup masyarakat, yang mencakup aspek kesehatan, pendidikan, dan pendapatan, menjadi salah satu indikator penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Wilayah dengan IPM yang tinggi cenderung memiliki sumber daya manusia yang lebih produktif, yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. PAD, sebagai salah satu sumber pendapatan utama daerah, memainkan peran penting dalam pembiayaan pembangunan. Peningkatan PAD memungkinkan

[17] Lingga Nopita Sari, Didik Susetyo, & M. Syirod Saleh, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Kredit Konsumsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2006-2015", *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 14, no. 1 (Juni 2016): 1-7.

pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana secara lebih efektif dalam pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan, yang menjadi motor penggerak ekonomi lokal.

Penelitian ini menjadi penting untuk memahami hubungan antara kemiskinan, IPM, dan PAD terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Jawa Timur selama periode 2019-2023. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan berbasis data untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi dalam memberikan kontribusi ilmiah dan praktis untuk pembangunan ekonomi di Jawa Timur.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Meskipun Jawa Timur memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, tingkat pertumbuhan PDRB di provinsi ini masih berada di bawah DKI Jakarta dan Jawa Barat. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai faktor-faktor apa saja yang menghambat pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur.
2. Data menunjukkan adanya peningkatan IPM dari tahun ke tahun, namun angka kemiskinan tidak selalu menurun secara konsisten, bahkan pada beberapa tahun kemiskinan justru meningkat. Fenomena gap ini

menimbulkan permasalahan dalam hubungan antara kualitas pembangunan manusia dengan pengentasan kemiskinan.

3. Meskipun terjadi penurunan persentase kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir, angka kemiskinan di Jawa Timur masih tergolong cukup tinggi dan mengalami fluktuasi yang tidak stabil. Hal ini berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
4. PAD yang merupakan sumber utama pembiayaan pembangunan daerah mengalami peningkatan, namun belum secara konsisten mampu menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan, terutama ketika terjadi penurunan PAD akibat kondisi luar biasa seperti pandemi Covid-19.
5. Masih diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana ketiga faktor ini saling berinteraksi dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di tingkat kabupaten/kota, sehingga kebijakan pembangunan dapat dirancang secara lebih efektif dan tepat sasaran.

Agar penelitian ini tetap fokus dan hasilnya dapat dianalisis secara mendalam, maka penelitian dibatasi pada hal-hal berikut:

1. Objek penelitian terbatas pada kabupaten/kota yang berada di Provinsi Jawa Timur dengan periode analisis data adalah dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.
2. Variabel yang dianalisis dalam penelitian ini adalah tingkat kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia, Pendapatan Asli Daerah, dan pertumbuhan ekonomi.

3. Data yang digunakan bersumber dari data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan sumber resmi terkait lainnya.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia, dan Pendapatan Asli Daerah secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2019-2023?
2. Apakah kemiskinan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2019-2023?
3. Apakah Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2019-2023?
4. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2019-2023?

D. Tujuan Penelitian

Adapun dari rumusan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menguji secara simultan pengaruh kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2019-2023.
2. Untuk menguji pengaruh kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2019-2023.

3. Untuk menguji pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2019-2023.
4. Untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2019-2023.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa kegunaan, baik kegunaan secara praktis maupun kegunaan secara teoritis yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Praktis
   a. Bagi Akademisi

      Bagi akademisi, manfaat penelitian dalam tulisan ini dapat menjadi khasanah kepustakaan serta sebagai bahan referensi bagi penulis selanjutnya yang mengusung tema yang sama yaitu terkait pengaruh kemiskinan, indeks pembangunan manusia, pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2019-2023.

   b. Bagi Peneliti

      Bagi penulis, penelitian ini dapat digunakan sebagai pembuktian antara teori-teori yang telah didapatkan di bangku perkuliahan dengan keadaan sebenarnya yang terjadi di lapangan.

2. Kegunaan Teoritis

   Secara teoritis, manfaat penelitian dalam tulisan ini yaitu sebagai tambahan literatur atau referensi serta menambah pengetahuan ilmu bagi penulis dan pembaca terkait pentingnya kemiskinan, indeks pembangunan

manusia, dan besarnya pengaruh pendapatan asli daerah bagi terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2019-2023.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Hal yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2019-2023 yang terdiri dari variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen (variabel bebas) terdiri dari kemiskinan, indeks pembangunan manusia, dan pendapatan asli daerah. Sementara pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen (variabel terikat).

G. Penegasan Variabel

Peneliti memaparkan pengertian dari pokok-pokok permasalahan dalam uraian selanjutnya untuk mempermudah dalam menelaah dan memahami istilah yang dikemukakan dalam judul penelitian di atas.beberapa istilah yang dikemukakan dalam judul yaitu sebagai berikut:

1. Definisi Konseptual
   a. Kemiskinan

      Kemiskinan merupakan kondisi kekurangan dalam berbagai aspek kehidupan yang disebabkan oleh keterbatasan modal, rendahnya tingkat pengetahuan dan keterampilan, rendahnya produktivitas serta

pendapatan, lemahnya daya saing hasil produksi masyarakat miskin, dan minimnya peluang untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.[18]

b. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat pembangunan manusia di suatu negara melalui gabungan tiga indikator utama, yaitu pendidikan, kesehatan, dan pendapatan riil per kapita yang telah disesuaikan.[19]

c. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, keuntungan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta sumber-sumber pendapatan sah lainnya yang menjadi hak pemerintah daerah.[20]

d. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan kapasitas suatu negara dalam jangka panjang untuk menghasilkan dan menyediakan berbagai jenis barang ekonomi bagi penduduknya. Peningkatan kapasitas ini dapat terjadi berkat kemajuan teknologi, perubahan kelembagaan, serta penyesuaian ideologi terhadap kondisi yang berkembang.[21]

---

[18] Mubyarto, *Penanggulangan Kemiskinan Dalam Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1998), 4.

[19] M. P. Todaro dan S. C. Smith, *Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2006), 434.

[20] Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Andi, 2013), 32.

[21] Michael Todaro, *Pembangunan Ekonomi Dunia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Erlangga, 2000), 44.

2. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur selama periode 2019–2023. Penelitian ini menekankan pada keterkaitan antara kondisi sosial-ekonomi suatu wilayah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai. Variabel kemiskinan digunakan untuk melihat sejauh mana tingkat kekurangan masyarakat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Indeks Pembangunan Manusia digunakan sebagai indikator kesejahteraan masyarakat dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah menggambarkan kemampuan keuangan daerah dari sumber-sumber pendapatan asli yang dimiliki dan digunakan untuk membiayai pembangunan. Variabel pertumbuhan ekonomi diukur berdasarkan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Hasil analisis ini diharapkan dapat menjadi dasar evaluasi dan perumusan kebijakan pembangunan daerah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat sedemikian rupa untuk memperjelas arah pembahasan masalah, sehingga disusun sistematika yang terdiri 3 (tiga) bagian, sebagai berikut:

1. Bagian Awal

   Pada bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, lembar persetujuan, lembar pengesahan, pernyataan keaslian, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi, dan abstrak.

2. Bagian Utama

   Pada bagian utama terdiri dari 6 (enam) bab, yaitu:

   BAB I PENDAHULUAN

   Pada bab ini diuraikan beberapa subbab terkait pendahuluan, yaitu: latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian, dan penegasan variabel, serta sistematika penulisan.

   BAB II LANDASAN TEORI

   Pada bab ini diuraikan secara ringkas beberapa teori yang diperoleh dari berbagai sumber terkait dengan variabel yang dibahas untuk mendukung penelitian. Teori tersebut yaitu mengenai pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia, dan Pendapatan Asli Daerah. Selain itu, pada bab ini juga diuraikan terkait penelitian terdahulu, kerangka teori, dan hipotesis penelitian.

   BAB III METODE PENELITIAN

   Pada bab ini diuraikan beberapa subbab terkait metode penelitian, yaitu: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, variabel dan skala

pengukuran, populasi, sampling, sampel penelitian, instrument penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data, serta tahapan penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisi mengenai deskripsi data dan temuan peneliti. Data yang dideskripsikan adalah data kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia, Pendapatan Asli Daerah, dan pertumbuhan ekonomi.

BAB V PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dan berisi beberapa subbab sesuai rumusan masalah.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dari keseluruhan penelitian dan saran-saran yang diberikan oleh peneliti kepada pihak yang terkait dalam penelitian ini.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir terdiri dari daftar rujukan, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.